

## HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

NIKEN YANUAR ANGGRAENI

030010774 U

FH

2004

164

Astutik, S.H., M.H.

Kebebasan pers yang tidak diperhatikan dikarenakan seluruh kalangan tidak dapat mengindahkan Undang-undang Pers. Sehingga kebebasan pers jadi tidak bisa berjaya atau bergerak dengan leluasa. Hambatan Yuridis melihat Hambatan yang terjadi banyak pada pasal-pasal lemah, sehingga pengadilan selalu memakai KUHP daripada Undang-undang Pers dengan kata lain bahwa pengadilan tidak selalu memakai mekanisme jurnalistik untuk penyelesaian masalah pers, hal ini yang mengakibatkan Undang-undang Pers terabaikan dan kebebasan pers menjadi sempit. Ketentuan hukum yang beraneka ragam pada dunia jurnalistik, bukan tidak mungkin akan terjadi overlapping peraturan. Wartawan ataupun dunia jurnalistik itu dapat diancam hukuman pidana penjara dan akan banyak lagi terjadi pengekangan kebebasan pers untuk menginformasikan berita kepada masyarakat. Hak tolak yang disalahgunakan oleh wartawan untuk di depan pengadilan karena pemberitaan yang di dapat bukan dari sumber yang berkompeten atau yang berhak.

Kebebasan pers

### BUKU / LITERATUR:

1. Assegaff, H Djafar, *Jurnalistik Masa Kini (Pengantar Ke Praktek Kewartawanan)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.

2. Peterson, Theodore, *Empat Teori Pers*, Jakarta: Intermedia, 1986.
3. Wahid, Abdul, *Penerapan Hak Tolak Wartawan Dalam Peradilan Delik Pers*, Bandung: Tarsito, 1997.
4. Seno Adji, Oemar, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990.
5. Harahap, Krisna, *Kebebasan Pers di Indonesia Yang Kaitannya dengan Surat Izin*, Jakarta, 1996.
6. Widnyana, I made, *Pers Nasional dan Delik Pers*, Jakarta: Bharata, 1984.
7. Siregar, Amir Effendi, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UI Press, 2002.

#### WAWANCARA

1. Titien LKM (Lembaga Konsumen Media), 2 November 2004

#### KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA

1. Poerwadarminta, W. J. S., PN Balai Pustaka, Jakarta

#### SURAT KABAR

1. Maksum, 17 Oktober 2004, " Dihukum Dewan Pers ", Surabaya: *Jawa Pos*
2. Panjaitan, Hinca IP, 8 Agustus 2004, " Lex Spesialis V Non Lex Spesialis ", Surabaya: *Jawa Pos*
3. G. Windarto, 12 Oktober 2003, " Undang-undang Perlu di Revisi ", Surabaya: *Suara Pembaharuan*
4. Lubis, H Sofyan, 15 Februari 2000, " Benarkah Undang-undang Pers tidak Melindungi Pers ", Jakarta: *Kompas*
5. Luwarso, Lukas, 13 Mei 2002, "Perluakah Undang-undang Pers di Revisi?", Jakarta: *Kompas*
6. Hamad, Ibnu, 18 Juni 2002, "Keperluan Mengubah Undang-undang No. 40 Tahun 1999 ", Jakarta: *Kompas*

#### PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
3. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4